

Sebelas Maret. Thesis

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework For Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.

E-Journal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 2, 2017. Jakarta.

Fairuza Mia. Kolaborasi antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. Volume 5 No 3, September-Desember 2013.

Hadi S. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *J Ilmu Pendidik*. 2016;22(1):74–9.

Hasanah, U, Tarma, & Jaelani, M. W. (2019). Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 6(02), 140–145.  
<https://doi.org/10.21009/jkkp.062.09>

Islamy, Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Istiana, P. (2016). Kolaborasi Perpustakaan & Stakeholder. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 1(2), 241–250.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jipi.v1i2.560>

Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis Stakeholders dalam Perspektif Governance: Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Jawa Tengah. *Proseding Seminar Dan Lokalkarya Kualitatif Indonesia 2019*, 21–28. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.21-28>

Mayasari, A. (2020). Bengkulu masuk 10 besar kasus tertinggi perkawinan anak di Indonesia. *ANTARA*. Retrieved from <https://bengkulu.antaranews.com/berita/93902/bengkulu-masuk-10-besar-kasus-tertinggi-perkawinan-anak-di-indonesia>

Marriam-Webster. Dictionary and Thesaurus. <https://www.merriam-webster/dictionary/collaboration>

McLanahan Sara and Isabel Sawhill. *Marriage and Child Wellbeing Revisited: Introducing the Issue*. FALL 2015, Vol. 25, No. 2

Muhammad, A. (2018). Konsep Dasar dan Definisi *Collaborative*. Repository.Umy.ac.id,46-54.

- Muqorrobin, M. (2016). Proses *Collaborative Governance* dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4 (1). 1-
- Nastipawa, Rio. 2019. Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun di Kabupaten Banyuasin. *DEJOS Vol. 3 No. 2*.
- Nurharyati Wahyu, A. Nelson A, Ari Wibowo. 2017. Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah. *PEKSOS: Jurnal ilmiah Pekerjaan Sosial Vol.16 No.2*.
- Oktaviana, Ita. 2021. Advokasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Sekretariat Negara RI. Jakarta
- Pratiwi, B., Angraini, W., Padila, P., NopiaWati, N., & Yandrizar, Y. (2019). Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 1,(1), 14-24.
- Rini Ita Mustofa, Yuni Dwi Tjadikijanto. 2018. Gambaran Program Generasi Berencana (GENRE) di Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 7, No. 2.
- Siti Munawwaroh. Volume 5, Nomor 1, Juni 2016. Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam.
- Sudarmo. (2009). Elemen-Elemen *Collaborative Leadership* dan Hambatan-hambatan bagi Pencapaian Efektivitas *Collaborative Governance*. *Jurnal Spirit Publik*. Volume 5; 2.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) di Kota Bandung ( Studi Kasus : Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan ). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23. Retrieved from <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak

di Bengkulu: dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>

Sunu A Retno, Hardi Warsono, Abd. Rachim. Juni 2020. *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doktor Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.

Sutopo H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.

Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Syafie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

Topatimasang, Roem. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Jakarta : Pustaka Belajar.

Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 8 ayat 1(b)

Unicef. org. Child Marriage Report. 2020. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang tidak bisa Ditunda.

Utami, Devi Dwi Yana. 2015. Penyuluhan Program BKKBN Mengenai Generasi Berencana (GenRe) dan Sikap Remaja. *Jurnal Simbolika*/Volume 1/Nomor 2.

Widyawati Eny, A. C. P., & Jurusan. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(4), 55–70.

Yulianti, Devi. 2017. Program Generasi Berencana (GenRe) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas. *Jurnal Analisis Sosial Politik* Volume 1, No 2.

Zainal S, Muh. 2018. Implementasi, Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial dalam program pembangunan bidang kesehatan (sebuah tinjauan teoritis). *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

#### **Sumber Internet**

<https://regional.kompas.com/read/2016/11/25/05383241/20.persen.perempuan.di.bengkulu.menikah.di.usia.muda>

[https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/224/mod\\_resource/content/0/sesi%20%20Teori%20%20Konsep%20advokasi.pdf](https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/224/mod_resource/content/0/sesi%20%20Teori%20%20Konsep%20advokasi.pdf)

<https://www.kompasiana.com/ahmadrizani/55007688813311c91afa7799/optimalisasi-peran-advokasi-dalam-mempengaruhi-kebijakan-publik>

**LAMPIRAN 1 :**

**Hasil Penelitian**

No	Fenomena	Gejala	Sub Gejala	Informan	Teknik Pengumpulan Data	Pertanyaan	Jumlah Informan	Kesimpulan
1	ADVOKASI PROGRAM GENERASI BERENCANA KABUPATEN BENGKULU TENGAH	ANALISIS	1. Ketersediaan informasi yang akurat 2. Pemahaman tentang isu yang ada	1) Sub bagian BKR BKKBN Provinsi Bengkulu 2) Sub bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 3) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1) Wawancara 2) Cek data angka permikahan dini di Kab Bengkulu Tengah	1. Bagaimana cara BKKBN memahami isu tentang permikahan usia muda yang masuk dalam program generasi berencana? 2. Apakah ada cara-cara tertentu dalam memahami isu agar tepat dalam menentukan strategi apa yang akan diterapkan dalam mengatasi permikahan usia muda ?	3 orang	Isu yang diangkat adalah bahwa masih banyak para remaja belum mengetahui apa itu program generasi berencana ini terutama isinya nya terkait dengan permikahan di usia anak. Sehingga permikahan dini di kabupaten Bengkulu tengah masih saja tinggi. Dan tidak semua anak tertarik membuka media sosial tentang program generasi berencana ini.
		STRATEGI	1. Membentuk kelompok kerja untuk mengembangkan strategi dan rencana kegiatan. 2. Identifikasi sumber daya (bangun kemitraan).	1) Sub bagian BKR BKKBN Provinsi Bengkulu 2) Sub bagian Kesehatan Masyarakat	1) Wawancara	1) Bagaimana komitmen BKKBN dengan pihak Diknas merumuskan strategi agar program genre ini bisa tersampaikan kepada remaja?	3 orang	Jadi stakeholder yang terlibat dalam program generasi berencana ini adalah BKKBN sebagai lembaga yang mengeluarkan program ini, dan juga ada Dinkes sebagai tim penyuluhan dan Diknas sebagai Koordinator untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kurangnya koordinasi dari para stakeholder